

Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bogor

Selfiany Goretty¹, Endeh Suhartini², Muhamad Husein Maruahey³

Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: selfigoretii@gmail.com^{1*}, endeh.suhartini@unida.ac.id²,
m.husein.maruahey@unida.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 03 Februari 2025

Revised : 08 Maret 2025

Accepted: 15 April 2025

Published: 29 Juni 2025

Keywords: Policy Implementation, Bakesbangpol, Drug Abuse, Bogor Regency, Prevention

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bakesbangpol, Penyalahgunaan Narkoba, Kabupaten Bogor, Penanggulangan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of government policies through the National Unity drug and Politics Agency (Bakesbangpol) in tackling drug abuse in Bogor Regency. Drug abuse in Bogor Regency is a serious problem that affects public health and social stability. Through various programs and activities, Bakesbangpol strives to raise public awareness, prevent drug abuse, and empower local communities. This study used a qualitative approach using interviews and observations to gather data from policy implementers and the community. The result indicate that despite various effort, challenges remain in policy implementation such as a lack of resources and coordination between agencies. This study is expected to provide recommendation for improving future drug control strategies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Pertumbuhan jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat menimbulkan keprihatinan yang

mendalam, sehingga penanggulangan masalah ini menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah.

Penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan yang kompleks di Kabupaten Bogor. Berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidakstabilan sosial, berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan, penanganan terhadap narkoba belum maksimal, masyarakat belum paham bahaya narkoba. Oleh karena itu, upaya penanggulangan narkoba perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Berdasarkan World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, ada sekitar 162 hingga 324 juta orang di seluruh dunia yang berusia antara 15 dan 64 tahun yang pernah menggunakan narkoba. Sementara itu, ada antara 16 dan 39 juta orang yang menggunakan narkoba secara teratur dan pecandu yang telah mengalami ketergantungan, menurut data dan analisis yang dikumpulkan oleh World Bank, United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC), dan WHO. Ada sekitar 12,7 juta orang, atau 8,9 hingga 22,4 juta orang, yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Dengan perkiraan 177 juta pengguna, ganja (cannabinoids) adalah narkoba yang paling banyak digunakan. Jenis opioid, Amphetamine Type Stimulant (ATS), dan kokain adalah yang berikutnya. Selain itu, jenis zat psikoaktif baru (NPS) telah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, membuat masalah semakin kompleks (BNN, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penyalahgunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi narkoba serta efektivitasnya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bogor. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dari perspektif kebijakan, pelayanan, maupun perhatian pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pengambil kebijakan. Metodologi ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi atau data terkait. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, seperti pejabat Bakesbangpol Kabupaten Bogor, anggota BNNK Bogor, perwakilan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan narkoba, dan masyarakat sekitar yang berdampak dalam penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mempelajari regulasi dan kebijakan yang mengatur implementasi sistem ini, termasuk prosedur, persyaratan, dan aturan aturan yang diperlakukan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2018). Reduksi data bertujuan untuk memilih informasi yang relevan, terutama terkait implementasi kebijakan tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta bahan adiktif lainnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian.

Penelitian, bersifat kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena, peristiwa atau kondisi secara teratur dan mendalam tanpa berusaha mencari hubungan sebab- akibat (Nasution, A.F. (2023). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena penyalahgunaan narkoba serta strategi kebijakan dalam penanggulangannya.

Hasil dan Pembahasan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Bogor merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu fungsi utama Bakesbangpol adalah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Dalam hal Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Bakesbangpol berkolaborasi dengan BNN melalui kegiatan Fasilitasi Tim Terpadu P4GN, Pembentukan Saka Anti Narkoba, dan Pembentukan Penyuluh Anti Narkoba Di 40 Kecamatan se- Kabupaten Bogor. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau lebih dikenal dengan P4GN dipopulerkan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Giat sosialisasi P4GN ini melibatkan seluruh elemen yang harus bersandar & duduk bersama bersama dalam memberantas serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya membahayakan fisik tetapi berpotensi mengganggu kejiwaan dan mental seseorang. Daya rusak narkoba merupakan ancaman yang serius dan mesin pembunuh massal yang merusak dari generasi ke generasi (cacat otak permanen). Penerapan P4GN dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan &

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika yang didalamnya juga menerangkan bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. (www.tugasbangsa.com). Namun, implementasi kebijakan ini tidak dari berbagai hambatan, Koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, masih menjadi kendala. Kurangnya sinkronisasi program dan perbedaan prioritas antar instansi dapat menghambat efektivitas penanggulangan narkoba (<https://bnn.go.id/>). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat. Bakesbangpol masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan narkoba, serta anggaran yang dialokasikan belum mencukupi untuk menjalankan program-program secara maksimal.

Hasil penelitian melihat peran serta Masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat sangat membantu keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Bakesbangpol. Peran Masyarakat sebagai pendukung dengan memberikan informasi dan ikut dalam kegiatan-kegiatan pencegahan kepada Masyarakat, sebagai motivator dengan memberikan dukungan moril kepada penyalahgunaan narkoba, Akan tetapi peran Masyarakat belum maksimal karena kurangnya informasi dan kesadaran tentang bahaya narkoba. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait melalui forum koordinasi yang rutin dan terstruktur. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program penanggulangan narkoba, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bakesbangpol. Ketiga, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kampanye penyadaran yang lebih efektif dan menghilangkan stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari narkoba.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bogor menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Penelitian ini

mengidentifikasi bahwa Bakesbangpol berperan sebagai koordinator utama dalam melaksanakan program-program pencegahan dan pemberantasan narkoba, dengan strategi yang berfokus pada sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Meskipun terdapat berbagai inisiatif yang positif, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Koordinasi antar instansi, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan, masih menjadi kendala.

Ketidakselarasan dalam prioritas dan program antar instansi dapat menghambat efektivitas upaya penanggulangan narkoba. Oleh karena itu, penting bagi Bakesbangpol untuk memperkuat jaringan kolaborasi dengan berbagai instansi untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak dalam satu visi yang sama.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Bakesbangpol seringkali kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan narkoba. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk program-program ini belum mencukupi. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi sumber daya agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan efektif.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat, partisipasi tersebut masih terbatas. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba. Oleh karena itu, kampanye penyadaran yang lebih efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menghilangkan stigma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, D., Suhartini, E., dan Yumarni, A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor Dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11, Nomor 105–224. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Djuanda.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2015). Laporan Tahunan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2019). Peraturan Narkotika dan Kebijakan Penanggulangan Narkoba. Jakarta: BNN.
- Chris Rowley & Keith Jackson. (2012). *Strategic Management: A Guide to Business and Management*. London: Routledge.

- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Freeman, G. (2006). *Public Policy: Concepts, Strategies, and Issues*. New York: Routledge.
- Iskandar. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono, Lydia Herlina., dan Satya Joewana. (2010). *Pencegahan dan Penanggulangan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mthethwa, R. (2012). *Implementation of Public Policy: Principles and Practice*. Cape Town: Juta.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nilasari, R. (2014). *Strategi Pemasaran dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Bogor No. 82 Tahun 2021. *Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya*. Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Partodiharjo, Subagyo. (2013). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pölzl, H. (2007). *Public Policy Implementation: A Comparative Perspective*. Berlin: Springer.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2012). *Teori Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. *Tentang Psikotropika*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. *Tentang Narkotika dan Peredarannya di Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Usman, Soubar. (2010). *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur.
- Yunita, R. (2019). *Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Reelhtdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hal. 39–40.